



JURNAL ILMIAH ECOBUSS

Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis

<https://e-journal.upm.ac.id/index.php/ecobuss/>

naskah dikirim	naskah direvisi	naskah diterima
16 Juli 2026	18 Agustus 2026	25 Agustus 2026

Peran Government Support dan Digital Financial Literacy terhadap Financial Inclusion UMKM Bandung

Muhammad Daffa Attaya¹, Reni Wijayanti², Hafid Aditya Pradesa³, Pepi Zulvia⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung

*e-mail : daffattaya2004@gmail.com (Penulis Korespondensi)

Abstrak:

Tingkat *financial inclusion* nasional Indonesia sudah tinggi, yaitu sebesar 80,51%, namun belum diimbangi oleh tingkat *financial literacy* yang setara sebesar 66,46%, sementara *government support* yang diterima pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung belum dirasakan merata oleh seluruh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi *government support*, *digital financial literacy*, dan *financial inclusion*, menganalisis peran *government support* dan *digital financial literacy* terhadap *financial inclusion*, serta merumuskan upaya peningkatan *financial inclusion* pada pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif eksplanatori dan metode survei terhadap 49 pelaku UMKM binaan yang dipilih melalui *purposive sampling*, dengan data yang ditransformasi menggunakan Metode *Successive Interval* (MSI) sebelum dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel berada pada kategori tinggi, dengan indeks persepsi rata-rata sebesar 3,89 untuk *government support*, 3,62 untuk *digital financial literacy*, dan 3,60 untuk *financial inclusion* (total rata-rata 3,70). *Government support* dan *digital financial literacy* masing-masing terbukti berperan positif dan signifikan terhadap *financial inclusion*, dengan nilai t hitung berturut-turut sebesar 3,338 dan 5,175, serta secara bersama-sama mampu menjelaskan 70,8% variasi *financial inclusion* (F hitung 59,302; signifikansi 0,000). Sebagai upaya peningkatan *financial inclusion*, penelitian ini merumuskan program Klinik Keuangan UMKM yang memadukan konsultasi akses pembiayaan formal, pelatihan literasi keuangan digital berbasis fintech, serta pemetaan dan advokasi kesesuaian produk keuangan dengan kebutuhan UMKM.

Kata kunci: *Digital Financial Literacy, Financial Inclusion, Government Support, Kota Bandung, UMKM*

Abstract:

Indonesia's national financial inclusion rate is relatively high at 80.51%, yet it has not been matched by an equally high financial literacy rate of 66.46%, while the government support received by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) assisted by the Bandung City Office of Cooperatives and MSMEs has not been equally felt by all business actors. This study aims to analyze the condition of

government support, digital financial literacy, and financial inclusion, to analyze the role of government support and digital financial literacy on financial inclusion, and to formulate efforts to improve financial inclusion among assisted MSMEs of the Bandung City Office of Cooperatives and MSMEs. The study uses a quantitative approach with an explanatory associative research type and a survey method involving 49 assisted MSME actors selected through purposive sampling, with the data transformed using the Successive Interval Method (MSI) prior to being analyzed using multiple linear regression. The results show that all three variables fall into the high category, with average perception indices of 3.89 for government support, 3.62 for digital financial literacy, and 3.60 for financial inclusion (overall average of 3.70). Government support and digital financial literacy each have a positive and significant role on financial inclusion, with t-values of 3.338 and 5.175 respectively, and jointly explain 70.8% of the variation in financial inclusion (F-value 59.302; significance 0.000). As an effort to improve financial inclusion, this study formulates an MSME Financial Clinic program that combines formal financing access consultation, fintech-based digital financial literacy training, and mapping-advocacy for the alignment of financial products with MSME needs.

Keywords: Bandung City, Digital Financial Literacy, Financial Inclusion, Government Support, MSMEs

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, aktivitas ekonomi berubah dengan cepat menuju ekonomi yang berfokus pada digital. Kemajuan internet, penyebaran telepon pintar, dan berbagai platform berbasis aplikasi mendorong pergeseran aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dari cara konvensional menuju metode yang terhubung dengan internet. Di Indonesia, tingkat penetrasi internet pada tahun 2025 telah mencapai 80,66%, atau setara 229 juta jiwa, meningkat 1,16% dibandingkan tahun sebelumnya [1]. Bank Indonesia memposisikan digitalisasi pembayaran sebagai elemen krusial dalam modernisasi sistem pembayaran nasional melalui pengembangan *mobile banking*, dompet digital, QRIS, dan berbagai inovasi pembayaran lainnya, guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha [2].

Dalam konteks tersebut, *financial inclusion* menjadi hal yang penting karena mencerminkan sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses serta memanfaatkan layanan tabungan, pinjaman, pembayaran, dan produk keuangan resmi lainnya secara aman, mudah, dan berkelanjutan [3]. Namun demikian, ketersediaan layanan keuangan digital tidak serta-merta menjamin pemanfaatan yang optimal, karena efektivitas penggunaannya tetap bergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan pengguna, atau *digital financial literacy* [4]. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 mencatat bahwa tingkat *financial literacy* masyarakat Indonesia berada pada angka 66,46%, sedangkan tingkat *financial inclusion* mencapai 80,51% [5]. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa akses keuangan yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemanfaatan yang optimal, sehingga *financial inclusion* sejatinya merupakan fondasi, bukan tujuan akhir, dalam mendukung pengembangan usaha [6], [7].

Kesenjangan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto maupun penyerapan tenaga kerja [8]. Meski memiliki

peran ekonomi yang penting, banyak pelaku UMKM masih menghadapi pembukuan yang belum rapi, keterbatasan akses pembiayaan formal, serta ketergantungan pada pembiayaan informal, bahkan berisiko terhubung dengan layanan keuangan yang tidak resmi [9], [8]. Kondisi ini menjadikan *digital financial literacy* sebagai aspek krusial, karena menentukan sejauh mana pelaku usaha mampu memahami, menggunakan, dan mengambil keputusan yang tepat atas layanan keuangan digital [10].

Selain kemampuan individu, *financial inclusion* pelaku UMKM juga sangat bergantung pada *government support*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menekankan kewajiban pemerintah menyediakan iklim usaha, pengembangan bisnis, pembiayaan, dan kemitraan sebagai bagian dari pemberdayaan UMKM [11]. Kota Bandung, yang dikenal sebagai bagian dari UNESCO *Creative Cities Network* di bidang desain [12] dan aktif mendorong digitalisasi UMKM melalui program MAREMA [13], memiliki Dinas Koperasi dan UMKM yang membina 1.002 unit UMKM melalui tenaga pendamping yang tersebar di 30 kecamatan [14]. Namun demikian, sejak tahun 2016 dari sekitar 9.000 UMKM yang telah mendapatkan program pendampingan, hanya sekitar 23% atau sekitar 2.000 UMKM yang berhasil naik kelas [15], sementara data mencatat terdapat 12.124 unit UMKM di Kota Bandung dengan sektor kuliner sebagai yang paling dominan [16]. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan *financial inclusion* tidak dapat dilihat semata dari sisi akses, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah yang dirasakan merata oleh pelaku usaha.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *financial literacy* maupun *digital financial literacy* berperan positif terhadap *financial inclusion* pelaku UMKM [17], [18], [19], sedangkan penelitian pada UMKM Generasi Z di Jawa Timur menemukan bahwa *government policy* dan *digital financial literacy* secara simultan berperan terhadap *digital financial inclusion* [20]. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan aspek perilaku individu, sementara peran faktor eksternal berupa *government support* belum banyak dikaji secara bersamaan dengan *digital financial literacy*, khususnya pada UMKM binaan pemerintah daerah. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara bersamaan peran *government support* dan *digital financial literacy* terhadap *financial inclusion* pada pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

Penelitian ini dibangun di atas tiga landasan teori yang saling melengkapi. Variabel *government support* dikaji menggunakan *Social Exchange Theory* [21], yang memandang hubungan pemerintah dan pelaku UMKM sebagai relasi pertukaran timbal balik, di mana dukungan pemerintah mendorong pelaku UMKM merespons secara positif dengan memanfaatkan layanan keuangan formal secara lebih aktif. Variabel *digital financial literacy* dianalisis melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) [22], yang menjelaskan bahwa adopsi layanan keuangan digital diperani oleh persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan. Sementara itu, variabel *financial inclusion* diposisikan menggunakan *Diffusion of Innovations Theory* [23], yang menjelaskan bahwa adopsi layanan keuangan formal menyebar bertahap sesuai persepsi kompatibilitas, kemudahan, dan keuntungan relatif bagi penggunaanya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa baik kondisi *government support*, *digital financial literacy*, dan *financial inclusion* pada pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, apakah *government support* dan *digital financial*

literacy berperan terhadap *financial inclusion*, serta bagaimana upaya peningkatan *financial inclusion* dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis peran kedua variabel tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ketiga variabel, menganalisis peran *government support* dan *digital financial literacy* terhadap *financial inclusion*, serta merumuskan upaya peningkatan *financial inclusion* pelaku UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi digital, keuangan digital, dan pemberdayaan UMKM, serta manfaat praktis bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam merumuskan kebijakan, bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan formal secara lebih optimal, bagi lembaga keuangan dalam merancang produk yang sesuai kebutuhan UMKM, serta bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan peran antar variabel berdasarkan data empiris [24]. Metode yang digunakan adalah survei dengan desain *cross sectional*, yaitu data dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu (bulan Juni 2026) tanpa pengulangan pada periode yang berbeda, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui peran *government support* (X1) dan *digital financial literacy* (X2) terhadap *financial inclusion* (Y), baik secara parsial maupun bersama-sama.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung yang berjumlah 1.002 unit usaha [14]. Sampel ditentukan menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* [25], dengan kriteria responden merupakan pelaku usaha di Kota Bandung, menggunakan layanan keuangan formal atau digital (*mobile/internet banking*, QRIS, *e-wallet*, atau kredit usaha bank/fintech resmi), serta terdaftar aktif sebagai binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Mengingat desain penelitian bersifat *cross sectional*, jumlah sampel tidak ditetapkan secara rigid di awal, melainkan ditentukan dari seluruh responden yang berhasil dijangkau dan memenuhi kriteria selama satu bulan pengumpulan data pada bulan Juni 2026, yang menghasilkan 49 responden yang lolos seleksi kelengkapan data. Sebelum digunakan secara penuh, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji cobakan (*pilot test*) menggunakan data dari 30 responden pertama yang merupakan bagian dari 49 responden akhir tersebut.

Instrumen dan Pengukuran Variabel

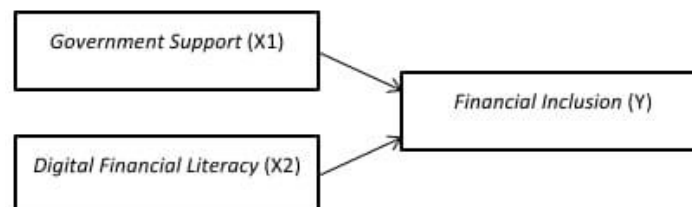
Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert 1-5 yang terdiri dari 20 item pernyataan, yaitu 6 item pada variabel *government support*, 6 item pada variabel *digital financial literacy*, dan 8 item pada variabel *financial inclusion*. Guna memberikan kejelasan operasionalisasi variabel sebagaimana masukan penelaah, indikator masing-masing variabel beserta sumber rujukannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian dan Sumber Rujukan

Variabel	Indikator	Sumber
<i>Government Support (X1)</i>	1. Pelatihan usaha dari pemerintah 2. Pendampingan usaha 3. Fasilitasi akses pembiayaan	[26]
<i>Digital Financial Literacy (X2)</i>	1. Pemahaman terhadap solusi pembayaran digital 2. Pemahaman terhadap produk pengelolaan aset digital 3. Pemahaman terhadap alternatif layanan keuangan digital berbasis fintech	[18]
<i>Financial Inclusion (Y)</i>	1. <i>Access</i> (Akses) 2. <i>Usage</i> (Penggunaan) 3. <i>Quality</i> (Kualitas) 4. <i>Welfare</i> (Kesejahteraan)	[27]

Sumber: Dikembangkan oleh Penulis (2026)

Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert 1-5 (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Mengingat data hasil kuesioner berskala ordinal, seluruh data terlebih dahulu ditransformasikan menjadi data berskala interval menggunakan Metode *Successive Interval* (MSI) sebelum dianalisis lebih lanjut, mengingat analisis regresi linear berganda mensyaratkan data pada skala interval [25], [28]. Model konseptual penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Dikembangkan oleh Penulis (2026)

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring (*Google Form*) kepada pelaku UMKM binaan, didukung metode luring apabila diperlukan untuk memenuhi jumlah sampel. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan publikasi resmi OJK, Bank Indonesia, World Bank, Open Data Kota Bandung, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Seluruh proses pengumpulan data memperhatikan aspek etika penelitian, meliputi *informed consent*, kerahasiaan data, tidak adanya unsur paksaan, serta kontrol kualitas melalui eliminasi respons yang tidak lengkap atau tidak konsisten.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu analisis statistik deskriptif, uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*, uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan ambang batas $\geq 0,70$ [29], uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas residual menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, uji multikolinearitas menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, serta uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser [29]. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

dengan Y adalah *financial inclusion*, a adalah konstanta, b1 dan b2 adalah koefisien regresi *government support* dan *digital financial literacy*, X1 adalah *government support*, X2 adalah *digital financial literacy*, dan e adalah *error term*. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) dan uji F (kelayakan model/*goodness of fit*) pada taraf signifikansi 5%, serta koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen menjelaskan variasi *financial inclusion*.

HASIL

Karakteristik Responden

Karakteristik 49 responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (32 orang; 65,3%), dengan kelompok usia terbanyak berusia ≤ 25 tahun (19 orang; 38,8%). Latar belakang pendidikan responden didominasi lulusan Sarjana/S1 (23 orang; 46,9%), sedangkan bidang usaha yang paling banyak digeluti adalah kuliner/makanan dan minuman (27 orang; 55,1%), sejalan dengan data yang mencatat sektor kuliner sebagai sektor UMKM terbesar di Kota Bandung [16]. Kelompok usaha dengan lama berdiri 1-2 tahun dan 3-5 tahun memiliki proporsi yang sama besar (masing-masing 19 orang; 38,8%), sehingga secara kumulatif 77,6% responden telah menjalankan usahanya selama 1 hingga 5 tahun. Seluruh responden (100%) menyatakan telah menggunakan layanan keuangan digital dan pernah mengikuti program pemberdayaan UMKM, sesuai dengan kriteria *purposive sampling* yang ditetapkan.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori (terbanyak)	Persentase
Jenis kelamin	Perempuan	65,3%
Usia	≤ 25 tahun	38,8%
Pendidikan terakhir	Sarjana (S1)	46,9%
Bidang usaha	Kuliner/makanan-minuman	55,1%
Lama usaha berdiri	1-2 tahun & 3-5 tahun	38,8% & 38,8%
Penggunaan layanan keuangan digital	Ya	100%
Keikutsertaan program pemberdayaan UMKM	Pernah	100%

Sumber: Data primer diolah (2026)

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan data 30 responden pertama sebagai *pilot test*. Hasil uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* ($df = n-2 = 47$, r tabel = 0,276) menunjukkan bahwa seluruh 20 item pernyataan pada variabel *government support*, *digital financial literacy*, dan *financial inclusion* memiliki nilai r hitung antara 0,641 hingga 0,860, seluruhnya lebih besar dari r tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	N of Items
<i>Government Support</i>	0,826	Reliabel	6
<i>Digital Financial Literacy</i>	0,875	Reliabel	6
<i>Financial Inclusion</i>	0,928	Reliabel	8

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, nilai *Cronbach's Alpha* ketiga variabel berada pada kategori reliabel jauh melebihi ambang batas minimum 0,70 [29], sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan konsisten sebagai alat pengumpul data.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap masing-masing variabel dengan interpretasi skala 1,00-1,80 (sangat rendah) hingga 4,21-5,00 (sangat tinggi). Perbandingan indeks persepsi rata-rata untuk ketiga variabel disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Rata-Rata Persepsi Responden

Variabel	Indeks Rata-Rata	Kategori
Government Support (X1)	3,89	Tinggi
Digital Financial Literacy (X2)	3,62	Tinggi
Financial Inclusion (Y)	3,60	Tinggi
Total Rata-Rata Indeks	3,70	Tinggi

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner (2026)

Berdasarkan Tabel 4, ketiga variabel berada pada kategori tinggi. *Government support* memperoleh indeks tertinggi 3,89 dengan butir pernyataan bimbingan pemerintah dalam menyelesaikan masalah usaha memperoleh nilai rata-rata tertinggi 4,00, sedangkan kemudahan mengajukan pinjaman atau bantuan modal memperoleh nilai terendah 3,71. Variabel *digital financial literacy* memperoleh indeks 3,62, dengan pemahaman penggunaan QRIS, dompet digital, dan *mobile banking* sebagai butir tertinggi yaitu 3,94, sedangkan pemahaman terhadap layanan keuangan digital berbasis fintech menjadi butir terendah dengan skor 3,14. Variabel *financial inclusion* memperoleh indeks 3,60, dengan penggunaan rutin layanan bank/lembaga keuangan resmi sebagai butir tertinggi 4,04, sedangkan kesesuaian layanan lembaga keuangan formal dengan kebutuhan usaha menjadi butir terendah 2,92. Total rata-rata indeks ketiga variabel sebesar 3,70 menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian positif, meskipun

pemahaman terhadap fintech dan kesesuaian layanan keuangan formal masih menjadi bagian yang paling perlu ditingkatkan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,174, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,521 dan VIF sebesar 1,918 pada kedua variabel independen, jauh di atas ambang batas *Tolerance* 0,10 dan jauh di bawah ambang batas VIF 10, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,508 untuk *government support* dan 0,652 untuk *digital financial literacy*, keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya ketiga uji asumsi klasik tersebut, model regresi yang dibangun dinyatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	Sig.	R Square
Konstanta	0,689	0,761	
Government Support (X1)	0,533	0,002	0,721
Digital Financial Literacy (X2)	0,782	0,000	

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner (2026)

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi $Y = 0,689 + 0,533X_1 + 0,782X_2 + e$. Koefisien regresi *government support* sebesar 0,533 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan *government support* akan meningkatkan *financial inclusion* sebesar 0,533 satuan, sedangkan koefisien *digital financial literacy* sebesar 0,782 menunjukkan peran yang lebih besar terhadap *financial inclusion* dibandingkan *government support*.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung *government support* sebesar 3,338 dengan signifikansi 0,002 (lebih besar dari t tabel 2,013 dan lebih kecil dari 0,05), dan *digital financial literacy* sebesar 5,175 dengan signifikansi 0,000 (juga lebih besar dari t tabel 2,013), sehingga kedua variabel secara parsial berperan positif dan signifikan terhadap *financial inclusion*. Hasil uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 59,302 dengan signifikansi 0,000, lebih besar dari F tabel 3,200 ($df_1 = 2$, $df_2 = 46$), yang menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk oleh *government support* dan *digital financial literacy* dinyatakan layak (*fit*) untuk memprediksi *financial inclusion*. Nilai R sebesar 0,849 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar variabel, dengan nilai R Square sebesar 0,721 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,708, yang berarti kedua variabel independen mampu menjelaskan 70,8% variasi *financial inclusion*, sedangkan sisanya 29,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Peran Government Support terhadap Financial Inclusion

Hasil uji t menunjukkan bahwa *government support* berperan positif dan signifikan terhadap *financial inclusion* pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, $B = 0,533$, t hitung $3,338 > t$ tabel 2,013, nilai sig. $0,002 < 0,05$. Temuan ini konsisten dengan hasil deskriptif, di mana indeks persepsi *government support* menjadi yang tertinggi di antara ketiga variabel dengan

3,89, dengan bimbingan pemerintah dalam menyelesaikan masalah usaha dipersepsikan paling baik (4,00), sedangkan kemudahan mengajukan pinjaman atau bantuan modal melalui program pemerintah menjadi dimensi yang relatif paling perlu diperkuat karena mendapat 3,71. Secara teoretis, temuan ini mendukung *Social Exchange Theory* [21], di mana dukungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung berupa pelatihan usaha, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan direspons secara positif oleh pelaku UMKM melalui pemanfaatan layanan keuangan formal yang lebih aktif sebagai bentuk timbal balik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menemukan peran positif *government support* maupun *government policy* terhadap *financial inclusion* pada pelaku UMKM [19], [20].

Implikasi strategis dari temuan ini adalah bahwa keberlanjutan *government support* perlu dijaga sekaligus diarahkan secara spesifik pada dimensi yang skornya paling rendah, yaitu kemudahan pengajuan pinjaman/bantuan modal dengan skor 3,71. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung secara konkret dapat: (1) memperluas nota kesepahaman dengan perbankan, koperasi simpan pinjam, dan fintech pembiayaan berizin OJK agar persyaratan dan alur pengajuan KUR maupun kredit UMKM lebih sederhana bagi UMKM binaan, (2) menghadirkan layanan konsultasi akses pembiayaan yang mendampingi pelaku usaha sejak penilaian kesiapan usaha, penyusunan dokumen/proposal, hingga penyaluran ke lembaga keuangan mitra dan (3) menjadikan program pelatihan dan pendampingan yang sudah dinilai baik skor tertinggi 4,00 sebagai kanal sosialisasi berkelanjutan atas layanan pembiayaan tersebut. Ketiga langkah ini menjadi komponen konsultasi pembiayaan dalam program Klinik Keuangan UMKM yang dirumuskan pada bagian akhir pembahasan ini.

Peran Digital Financial Literacy terhadap Financial Inclusion

Digital financial literacy terbukti berperan positif dan signifikan terhadap *financial inclusion* $B = 0,782$, t hitung $5,175 > t$ tabel $2,013$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$, dengan koefisien regresi yang lebih besar dibandingkan *government support*, menunjukkan peran yang lebih dominan. Hasil deskriptif menunjukkan indeks persepsi *digital financial literacy* sebesar 3,62, dengan pemahaman penggunaan QRIS, dompet digital, dan *mobile banking* memperoleh skor tertinggi yaitu 3,94, sedangkan pemahaman terhadap alternatif layanan keuangan digital berbasis fintech memperoleh skor terendah yaitu 3,14. Pola ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM sudah cukup terampil memanfaatkan instrumen pembayaran digital dasar, tetapi pemahamannya terhadap produk keuangan digital yang lebih kompleks masih relatif terbatas. Secara teoretis, temuan ini mendukung *Technology Acceptance Model* [22], yang menjelaskan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan yang tinggi terhadap layanan pembayaran digital dasar mendorong pelaku UMKM untuk semakin aktif memanfaatkan layanan keuangan formal, sementara persepsi yang belum setinggi itu terhadap fintech turut membatasi optimalisasi *financial inclusion*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menemukan peran positif *digital financial literacy* terhadap *financial inclusion* pelaku UMKM [17], [18], [20], [30].

Implikasi strategis dari temuan ini adalah bahwa peningkatan *financial inclusion* melalui jalur *digital financial literacy* perlu diarahkan secara spesifik pada kesenjangan antara pemahaman dasar dan pemahaman lanjutan, mengingat kemampuan pelaku UMKM terhadap pembayaran digital dasar dengan skor 3,94 sudah jauh lebih matang dibandingkan pemahamannya terhadap fintech dengan skor 3,14. Berangkat dari kesenjangan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung secara konkret dapat: (1) menjadikan pelatihan literasi keuangan digital berbasis fintech sebagai

kegiatan inti (bukan pelengkap) dalam program Klinik Keuangan UMKM, dengan materi yang secara eksplisit mencakup pengenalan produk fintech legal (pinjaman digital, simpanan digital, pembayaran digital), cara memeriksa legalitas penyelenggara melalui daftar resmi OJK, serta simulasi praktik penggunaannya secara aman, (2) menyusun materi dengan bahasa sederhana dan studi kasus nyata usaha mikro, mengingat mayoritas responden berpendidikan SMA/SMK hingga S1, agar pesan literasi mudah dipahami lintas latar belakang pendidikan dan (3) menjadikan penguatan pemahaman fintech sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko, yaitu melindungi pelaku UMKM dari keterjebakan pada layanan pinjaman daring ilegal akibat rendahnya kemampuan membedakan fintech resmi dan ilegal. Keberhasilan langkah ini diukur melalui kenaikan skor pemahaman fintech minimal 20% dari skor awal 3,14 pada evaluasi *pre test* dan *post test* pelatihan, sebagaimana ditetapkan dalam indikator keberhasilan program Klinik Keuangan UMKM.

Peran Government Support dan Digital Financial Literacy secara Bersama-Sama terhadap Financial Inclusion

Hasil uji F menunjukkan bahwa *government support* dan *digital financial literacy* secara bersama-sama berperan positif dan signifikan terhadap *financial inclusion* dengan hasil F hitung 59,302 dan nilai sig. 0,000 < F tabel 3,200, dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,708 yang berarti kedua variabel mampu menjelaskan 70,8% variasi *financial inclusion*, sedangkan sisanya 29,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal maupun ketersediaan infrastruktur digital. Temuan ini menunjukkan bahwa *Social Exchange Theory* dan *Technology Acceptance Model* saling melengkapi: *government support* menjadi dorongan eksternal, sementara *digital financial literacy* menjadi kesiapan internal yang membuat pelaku UMKM lebih siap memanfaatkan layanan keuangan formal, sejalan dengan *Diffusion of Innovations Theory* yang menempatkan adopsi inovasi keuangan sebagai hasil interaksi faktor eksternal dan internal [23]. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian kedua variabel secara bersamaan dalam satu model pada UMKM binaan pemerintah daerah, yang belum banyak dikaji pada penelitian terdahulu.

Implikasi strategis dari peran simultan kedua variabel ini adalah bahwa upaya peningkatan *financial inclusion* pelaku UMKM binaan tidak dapat hanya mengandalkan salah satu sisi secara terpisah, melainkan perlu memadukan penguatan dukungan eksternal pemerintah dan penguatan kesiapan internal pelaku usaha dalam satu program yang terintegrasi, karena kontribusi *Adjusted R Square* sebesar 70,8% menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memang secara bersama-sama menjadi penentu utama, bukan penentu tunggal, bagi *financial inclusion*. Secara operasional, implikasi ini diterjemahkan ke dalam tiga langkah yang saling terkait. Pertama, dari sisi sasaran, program perlu difokuskan pada tiga butir dengan skor terendah lintas ketiga variabel, yaitu kemudahan pengajuan pinjaman/bantuan modal (3,71) sebagai representasi *government support*, pemahaman terhadap layanan fintech (3,14) sebagai representasi *digital financial literacy*, dan kesesuaian layanan lembaga keuangan formal dengan kebutuhan usaha (2,92) sebagai representasi *financial inclusion* itu sendiri, agar intervensi tepat sasaran pada titik lemah yang sesungguhnya. Kedua, dari sisi kelembagaan, ketiga sasaran tersebut diwadahi dalam satu program terpadu, yaitu Klinik Keuangan UMKM, yang memadukan konsultasi akses pembiayaan (memperkuat *government support*), pelatihan literasi keuangan digital berbasis fintech (memperkuat *digital financial literacy*), serta pemetaan dan advokasi kesesuaian produk keuangan kepada mitra lembaga keuangan

(menyasar langsung indikator *financial inclusion* yang skornya paling rendah), sehingga dukungan eksternal dan kesiapan internal diintervensi dalam satu siklus layanan yang sama, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, dari sisi keberlanjutan dan keterukuran, program dirancang dengan pendekatan *zero based budgeting* memanfaatkan sumber daya pegawai yang telah dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung agar mudah direplikasi tanpa beban anggaran baru yang besar, menyasar 150 pelaku UMKM binaan pada tahun pertama, dengan indikator keberhasilan berupa kenaikan minimal 20% pada skor pemahaman fintech dan skor kesesuaian layanan keuangan formal berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, serta target minimal 20% peserta konsultasi berhasil mengajukan pembiayaan formal. Dengan demikian, program ini secara langsung menjawab rumusan masalah ketiga penelitian ini mengenai upaya peningkatan *financial inclusion* berdasarkan peran *government support* dan *digital financial literacy*, sekaligus menjadi jembatan antara temuan statistik dan langkah kebijakan yang dapat dieksekusi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, kondisi *government support*, *digital financial literacy*, dan *financial inclusion* pada pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung secara keseluruhan berada pada kategori tinggi, dengan total indeks rata-rata persepsi sebesar 3,70. *Government support* dipersepsikan paling kuat, terutama pada dimensi pendampingan usaha, sedangkan *digital financial literacy* dan *financial inclusion* masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, khususnya pada pemahaman layanan fintech dan kesesuaian layanan lembaga keuangan formal dengan kebutuhan usaha. Kedua, *government support* dan *digital financial literacy* masing-masing terbukti berperan positif dan signifikan secara parsial terhadap *financial inclusion* (t hitung 3,338 dan 5,175), dan juga berperan signifikan secara bersama-sama (F hitung 59,302 dan nilai sig. 0,000), dengan kemampuan menjelaskan 70,8% variasi *financial inclusion* (*Adjusted R Square* 0,708), sementara *digital financial literacy* menunjukkan peran yang lebih dominan dibandingkan *government support*. Ketiga, upaya peningkatan *financial inclusion* pada pelaku UMKM binaan dirumuskan melalui program Klinik Keuangan UMKM, yang memadukan konsultasi akses pembiayaan, pelatihan literasi keuangan digital berbasis fintech, serta pemetaan dan advokasi kesesuaian produk keuangan dengan kebutuhan UMKM.

Saran

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung disarankan memperkuat modul literasi keuangan digital, khususnya pengenalan layanan fintech resmi, ke dalam program pelatihan dan pendampingan yang telah berjalan, memperluas fasilitasi akses pembiayaan formal melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap tingkat *financial inclusion* UMKM binaan. Pelaku UMKM disarankan lebih aktif mengikuti program pembinaan pemerintah, meningkatkan pemahaman mengenai layanan keuangan digital berbasis fintech, serta memanfaatkan layanan keuangan formal secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Politeknik STIA LAN Bandung dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan pengayaan materi perkuliahan pada bidang administrasi bisnis sektor publik,

kebijakan pemberdayaan UMKM, dan ekonomi digital. Lembaga keuangan, baik perbankan maupun fintech resmi, disarankan mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM binaan pemerintah daerah, serta berkolaborasi dalam edukasi literasi keuangan digital. Adapun peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan populasi penelitian, mempertimbangkan desain penelitian longitudinal, menambahkan variabel lain di luar model ini seperti kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal atau ketersediaan infrastruktur digital, serta memperbesar jumlah responden pada tahap uji coba instrumen agar tidak tumpang tindih dengan sampel akhir penelitian.

REFERENSI

- [1] APJII, 2025, Survei Internet APJII 2025, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta.
- [2] Bank Indonesia, 2025, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia, Jakarta.
- [3] OJK, 2021, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- [4] The World Bank, 2022, DFS Overview: Digital Financial Services, World Bank Group, Washington D.C.
- [5] OJK, 2025, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- [6] World Bank, 2021, Financial Inclusion, World Bank Group, Washington D.C.
- [7] Demircuc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., and Hess, J., 2018, The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution, World Bank Group, Washington D.C.
- [8] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025, Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia, Kemenko Perekonomian RI, Jakarta.
- [9] Agung, G., and Lestari, K., 2025, Tantangan Akses Pembiayaan UMKM terhadap Lembaga Keuangan Formal di Indonesia, Jurnal Nirta: Studi Inovasi, vol 4, no 2, hal 2807-6648.
- [10] OECD, 2022, Recommendation of the Council on High-Level Principles on Financial Consumer Protection, OECD Publishing, Paris.
- [11] Legalitas.org, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- [12] BAPPEDA JABAR, 2015, UNESCO Umumkan Kota Bandung sebagai Kota Desain Dunia, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- [13] Rani, 2025, Dorong UMKM Go Digital dan Naik Kelas, Pemkot Bandung Luncurkan MAREMA, Diskominfo Kota Bandung, Bandung.
- [14] Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, 2026, Data UMKM Kota Bandung, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Bandung.
- [15] Newswire, 2023, 2.000 UMKM di Kota Bandung Naik Kelas Usai Pendampingan, Bisnis.com, Jakarta.

- [16] Open Data Jabar, 2025, Jumlah Usaha Mikro Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Bandung, Open Data Jabar, Bandung.
- [17] Kurniasari, F., 2023, The Effect of Financial Literacy on Financial Inclusion in Sustaining Indonesia SMEs Growth, Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, vol 7, no 2.
- [18] Widyastuti, U., Respati, D., K., and Mahfirah, T., F., 2024, Digital Financial Literacy and Digital Financial Inclusion: A Multigroup Analysis Based on Gender, Humanities and Social Sciences Letters, vol 12, no 1, hal 33-42.
- [19] Istan, M., 2023, The Role of Government, Financial Literacy and Inclusion on MSME Financial Performance, Riset & Jurnal Akuntansi, vol 7.
- [20] Rahiimah, N., I., N., and Andriani, S., 2025, Government Policy and Digital Financial Literacy as Drivers of Digital Financial Inclusion: Evidence from Gen Z MSMEs in East Java, Indonesia, Asian Journal of Economics, Business and Accounting, vol 25, no 12, hal 390-402.
- [21] Blau, P., 1964, Exchange and Power in Social Life, Ed. 2, John Wiley & Sons, New York.
- [22] Rizky, S., W., 2021, Technology Acceptance Model, CV. Seribu Bintang, Malang.
- [23] Garcia-Aviles, J., A., 2020, Diffusion of Innovation, The International Encyclopedia of Media Psychology, hal 1-8.
- [24] Creswell, J., W., and Creswell, J., D., 2018, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Ed. 5, SAGE Publications, California.
- [25] Sugiyono, 2023, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Ed. 2, Alfabeta, Bandung.
- [26] Barbosa, M., W., 2024, Government Support Mechanisms for Sustainable Agriculture: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda, Sustainability (Switzerland), vol 16, no 5.
- [27] Sanistasya, P., A., Raharjo, K., and Iqbal, M., 2019, The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on Small Enterprises Performance in East Kalimantan, Jurnal Economia, vol 15, no 1, hal 48-59.
- [28] Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Ed. 2, Alfabeta, Bandung.
- [29] Ghozali, I., 2018, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Ed. 9, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [30] Haikal, F., Fitri, D., Priyono, A., and Putri, N., E., 2025, The Mediating Role of Financial Inclusion in the Relationship between Financial Literacy and MSME Performance, Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship, vol 9, no 2, hal 295-309.